

SKRIPSI

**PERAN DINAS KOPERASI DAN IKM KOTA MATARAM DALAM
PENGEMBANGAN UKM DI KOTA MATARAM TAHUN 2018**

**ROLE OF MATARAM COOPERATIVE AND IKM OFFICE IN THE
DEVELOPMENT OF SMES IN MATARAM CITY IN 2018**



OLEH:

**PAVIN ARLEY
NIM.216130002**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 202**

0

SKRIPSI

PERAN DINAS KOPERASI DAN IKM KOTA MATARAM DALAM PENGEMBANGAN UKM DI KOTA MATARAM TAHUN 2018

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

**PAVIN ARLEY
NIM.216130002**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 202**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERAN DINAS KOPERASI DAN IKM KOTA MATARAM DALAM
PENGEMBANGAN UKM DI KOTA MATARAM TAHUN 2018



Disusun dan diajukan oleh:

PAVIN ARLEY
NIM.216130002

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang skripsi

Mataram, 23 Juli 2020

Pembimbing I

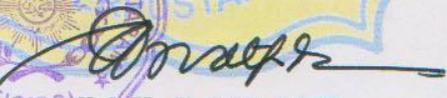

Dedy Iswanto, ST, MM
NIDN. 0818087901

Pembimbing II


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui.

Ketua Program Studi
Studi Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PERNGESAHAN

SKRIPSI

PERAN DINAS KOPERASI DAN IKM KOTA MATARAM DALAM
PENGEMBANGAN UKM DI KOTA MATARAM TAHUN 2018

Disusun dan diajukan oleh

PAVIN ARLEY



NIM.216130002
PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 18 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

Dedy Iswanto, ST, MM
NIDN.0818087901

Avatullah Hadi, S.IP, M.IP
NIDN.0816057902

L. Sopan Tirta Kusuma, S.IP, M.IP
NIDN.0825038303

Ketua (.....)

Anggota 1 (.....)

Anggota II (.....)

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

UPT. PERPUSTAKAAN

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 12 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,

Pavin Arley



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PAVIN ARLEY
NIM : 216130002
Tempat/Tgl Lahir : Samarinda, 04 Juni 1998
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 083114198327
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram dalam Pengembangan UKM Kota Mataram Tahun 2018

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : Senin, 19-09-2020

Penulis



PAVIN ARLEY
NIM. 216130002

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PAVIN ARLEY. Lahir di Samarinda, 04 Juni 1998. Penulis lahir dari pasangan Bapak Makbul Sahabudin dan Ibu Iin Nurainah sebagai anak kedua. Penulis menempuh pendidikan dari tahun 2004, dimulai dari Sekolah Dasar (SDN) Negeri 2 Terara dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Terara dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terara dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas penulis kemudian melanjutkan pendidikan di bangku kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram sebaga mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan.

MOTTO

Hidup merupakan sebuah perjuangan.

Perjuangan untuk menggapai sebuah impian di masa yang akan datang.

Jangan mudah putus asa ketika kita terjatuh. Bangkitlah dengan semangat yang tiada henti, ketika gagal. Maka bangkitlah dari kegagalan itu dan yakinlah bahwa kegagalan adalah awal dari pada kesuksesan dan Allah selalu bersama hambanya.

Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 96 yang artinya "dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik lagi dan apa yang telah mereka kerjakan"

Maka bersabarlah dan bangkitlah untuk bisa menciptakan sebuah perubahan di masa depan yang cemerlang.



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku. Yang aku hormati dan aku banggakan. Selalu menguatkanmu sepenuh jiwa raga, merawatmu, memotivasiku dengan nasehat yang luar biasa, dan mendoakanku agar selalu ada dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu-ilmu Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Sahabat-sahabatku yang selalu saling menyemangati
4. Sahabat seperjuangan Ilmu Pemerintahan dan seluruh angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat dengan pancaran nilai-nilai Rabbani.



ABSTRAK

Pavin Arley. 216130002. Skripsi Tahun 2020. Peran Dinas Koperasi Dan IKM Kota Mataram Dalam Pengembangan UKM Di Kota Mataram Tahun 2018. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Dosen Pembimbing I: Dedy Iswanto, ST, MM. Dosen Pembimbing II: Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP.

Kedudukan umkm dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, melainkan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. Disamping itu umkm juga memiliki potensi penghasil devisa yang cukup besarmelalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadapProduk Domestik Bruto (PDB). Senacara umum umkm memiliki kedudukan yang sangat potensial dalam perekonomian nasiol, namun kenyataannya masih banyak masalah yang menghadang dalam pengembangan umkm tersebut. Umkm Kota Mataram pada tahun 2018 terdapat 58.146 unit usaha dengan rincian 110.322 usaha mikro, 11.007 usaha kecil, 632 usaha menengah dan 179 usaha besar.

Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang umkm sangat diperlukan, terutama dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Mataram yang selama ini belum optimal dikalangan UMKM.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan sektor UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram dalam pengembangan sektor UMKM, yaitu: (Pertama) Strategi Perkuatan, dimaksudkan untuk memperkuat jalannya usaha sektor UMKM agar keberadaannya dapat selalu eksis dan bertahan di tengah perkembangan jaman. (Kedua) Strategi Pemberdayaan, merupakan strategi untuk melakukan usaha-usaha dalam rangka untuk memberdayakan keeksistensian sektor UMKM. (Ketiga) Strategi Perlindungan, dimaksudkan untuk melindungi jalannya usaha UMKM, agar hambatan-hambatan dalam perjalanan usahanya dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Strategi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Pengembangan UMKM

ABSTRACT

Pavin Arley. 216130002. Thesis year 2020. The role of Mataram City Cooperative and IKM Office in the Development of SMEs in Mataram City in 2018. Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University mataram. Lecturer Of Guidance I: Dedy Iswanto, ST, MM. Lecturer Of Guidance II: Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP.

The position of MSMEs in the national economy is not only due to its large number, but also in terms of labor absorption. In addition, SMEs also have considerable foreign exchange-generating potential through certain commodity export activities and contributing to Gross Domestic Product (GDP). The general senacara of SMEs has a very potential position in the economy, but in reality there are still many problems that are facing in the development of the MSME. Umkm Mataram City in 2018 there were 58,146 business units with details of 110,322 micro enterprises, 11,007 small businesses, 632 medium enterprises and 179 large businesses.

Kinerja Cooperative Office and SME Mataram City to carry out various development programs and activities in the field of MSMEs is indispensable, especially in the empowerment of micro, small and medium enterprises in Mataram City that have not been optimal among MSMEs.

The purpose of this research is to find out the strategy of developing the MSME sector by the Cooperative and SME Office of Mataram City.

The results showed that the strategi implemented by the Cooperative Office and SMEs of Mataram City in the development of the MSME sector, (First) Strengthening Strategy,, intended to strengthen the business of the MSME sector so that its existence can always exist and survive in the midst of the development of the times. (Second) Empowerment Strategy,, is a strategy to conduct efforts in order to empower the extension of the MSME sector. (Third) Protection Strategy,, to protect the course of MSME business, so that obstacles in the course of its business can be minimized.

Keywords: Strategy, Small and Medium Micro Enterprises (MSMEs), MSME Development

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirohiim

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Peran Dinas Koperasi dan IKM Kota Mataram Dalam Pengembangan UKM di Kota Mataram Tahun 2018.

Penulis menyadari bahwa selesainya proposal skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

Bapak Dedy Iswanto, ST, MM selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan dan memberi banyak masukan dalam menyelesaikan penulisan ini.

Drs. H. Abdurrahman, MM selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh masa studi.

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Ayatullah Hadi, S. IP, M. IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan atas ilmu yang diberikan selama ini.

Serta semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan dari pembaca. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Mataram, 12 Agustus 2020

Pavin Arley



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan.....	7
1.3.2 Manfaat.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Manajemen	9

2.2. Perencanaan Strategis.....	13
2.3. Strategi.....	21
2.4. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).....	28
2.5. Pengembangan UMKM	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Subyek dan Obyek Penelitian.....	34
3.3. Teknik Pengumpulan Data	36
3.4. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Pengembangan Sektor UMKM Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Mataram.....	40
4.2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat.....	94
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	102
5.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105

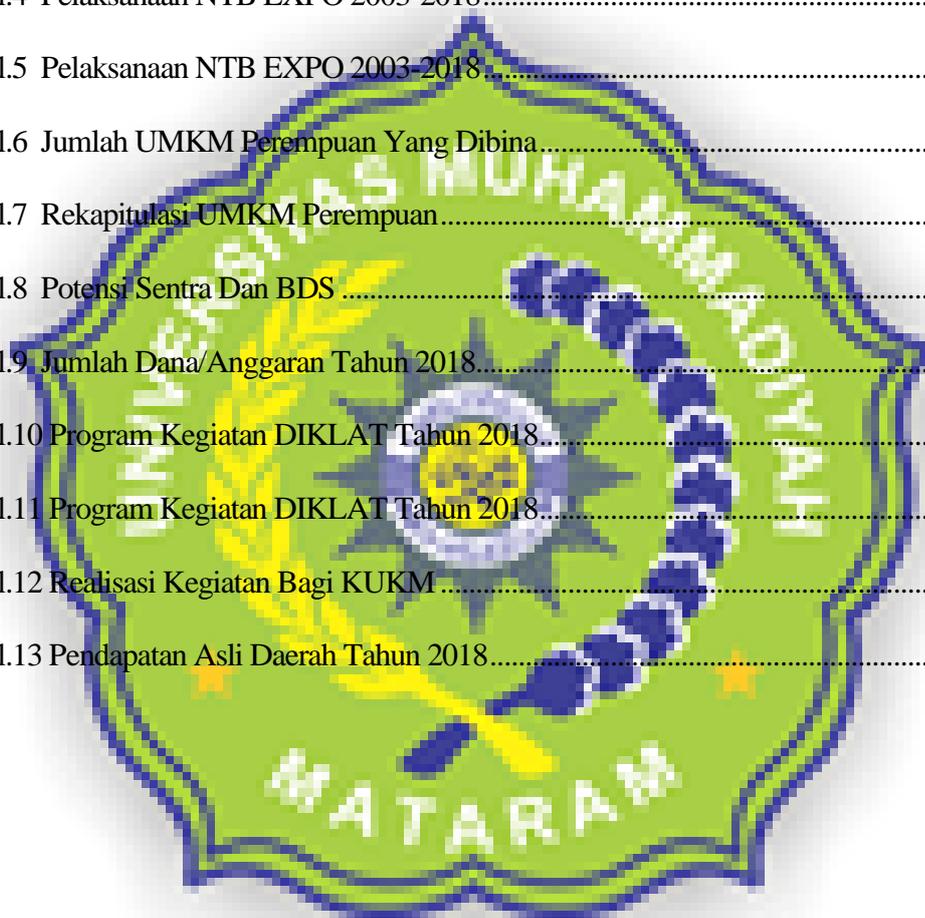
DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Matriks Analisa Swot	19
Gambar.2 Diagram Manajemen Strategik Sebagai Sistem	26
Gambar.3 Model Analisis Interaktif	39
Gambar.4 Wirausaha Pemula Penerima Bantuan Modal Usaha	47



DAFTAR TABEL

Tabel.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	29
Tabel.2 Bantuan Permodalan Dana APBN Dan APBD	46
Tabel.3 Jumlah UMKM Peserta Pameran Tahun 2018	51
Tabel.4 Pelaksanaan NTB EXPO 2003-2018.....	53
Tabel.5 Pelaksanaan NTB EXPO 2003-2018.....	54
Tabel.6 Jumlah UMKM Perempuan Yang Dibina.....	55
Tabel.7 Rekapitulasi UMKM Perempuan.....	56
Tabel.8 Potensi Sentra Dan BDS	57
Tabel.9 Jumlah Dana/Anggaran Tahun 2018.....	62
Tabel.10 Program Kegiatan DIKLAT Tahun 2018.....	62
Tabel.11 Program Kegiatan DIKLAT Tahun 2018.....	63
Tabel.12 Realisasi Kegiatan Bagi KUKM	65
Tabel.13 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.4. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan masing-masing menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, pemerintah daerah diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dilaksanakan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan otonomi daerah tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang membawa perubahan besar terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka dapat dilihat bahwa adanya landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan otonomi daerah,

dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mewujudkan daerah yang mandiri dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa sesuai dengan UUD 1945. Selain itu, konsekuensi dari adanya kebijakan otonomi daerah tersebut adalah adanya upaya pemberdayaan dan peningkatan perekonomian daerah melalui perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Pengaruh dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut adalah pada terbentuknya daerah-daerah otonom. Di mana dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa daerah otonom merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap daerah otonom berhak mengatur pemerintahannya sendiri. Dengan kata lain, pemerintahan di Indonesia bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah pusat, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah itu sendiri.

Akibat lain dari pemberian hak otonom tersebut adalah adanya perubahan pada pendekatan pembangunan. Pendekatan yang digunakan tidak lagi bersifat Top Down dan sentralistis, tetapi lebih mengutamakan peran serta masyarakat (Bottom Up) dan desentralisasi, seiring dengan meningkatnya partisipasi dan tingginya gairah kehidupan demokrasi di masyarakat.

Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal 33 tersebut bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan,

bukan kemakmuran orang seorang. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Untuk itu, perlu disusun strategi pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Pertama, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak tenaga kerja jika dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDRB cukup signifikan.

Dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat dipelajari dari pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB). Semakin tinggi peningkatan PDRB di suatu daerah, semakin tinggi juga peningkatan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, perluasan lapangan kerja, dan pemerataan hasil pembangunan. Pertumbuhan PDRB di suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang semakin mengglobal, tetapi dipengaruhi juga oleh kebijakan pemerintah yang berupaya mengarahkan pertumbuhan ekonomi di daerah, antara lain dilaksanakan oleh satuan kerjaperangkat daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. Karena itu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM di suatu daerah menjadi sangat penting dalam proses pertumbuhan perekonomian daerah tersebut.

Bila pelaksanaan berbagai kebijakan dan kegiatan pembangunan di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang diselenggarakan pemerintah berlangsung efektif, maka efektivitas pembangunan tersebut merupakan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram menjadi sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Kota Mataram. Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram yang optimal dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang umkm, tentu tidak hanya bertujuan mewujudkan kondisi perekonomian yang kondusif bagi pelaku ekonomi, tetapi sekaligus juga menstimulasi perluasan lapangan kerja.

Adanya krisis perekonomian nasional sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi, dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha yang semakin terpuruk, sementara umkm serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Kedudukan umkm dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, melainkan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. Disamping itu umkm juga memiliki potensi penghasil devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Secara umum umkm memiliki kedudukan yang sangat potensial dalam perekonomian nasional, namun kenyataannya masih banyak masalah yang menghadang dalam pengembangan umkm tersebut. Di Kota Mataram selama periode 2016-2018 jumlah umkm dari 58.026 pada tahun 2016 menjadi 58.146 umkm pada tahun 2018. Berdasarkan data tersebut pada tahun 2018 terjadi

perkembangan sekitar 120 unit usaha yang baru berfungsi dengan demikian terdapat 58.146 unit usaha yang aktif.

Umkm Kota Mataram pada tahun 2018 terdapat 58.146 unit usaha dengan rincian 110.322 usaha mikro, 11.007 usaha kecil, 632 usaha menengah dan 179 usaha besar. (Sumber :Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram). Dalam hal ini, adalah kelemahan akses pada informasi dan perluasan pangsa pasar, kelemahan akses dan pemupukan modal, kelemahan akses pada informasi dan teknologi, kelemahan dalam manajemen organisasi, serta kelemahan dalam pembentukan jaringan usaha dan kemitraan. Oleh karena itu, peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang umkm sangat diperlukan, terutama dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Mataram yang selama ini belum optimal di kalangan umkm.

Dampak dari kinerja yang belum optimal itu tentu tidak terbatas hanya persoalan-persoalan internal Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram, tetapi dapat juga berdampak pada aktivitas-aktivitas para pelaku ekonomi di Kota Mataram. Misalnya pelayanan perizinan usaha yang tidak efektif, menyita waktu lama dan menyerap biaya tinggi tentu tidak hanya menghambat upaya perluasan lapangan kerja melalui pengembangan berbagai usaha. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram yang profesional dan akuntabel dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan serta transparan dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik perlu dilakukan secara terpol, menyeluruh dan berkesinambungan.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya

pasar dalam negeri, merupakan ancaman bagi usaha kecil dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dari dampak globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan umkm saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, sehingga kemandirian umkm diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pembangunan ekonomi usaha mikro maupun kecil selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha mikro maupun usaha kecil, baik di sektor tradisional maupun di sektor modern.

Usaha pengembangan yang telah dilaksanakan pemerintah masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan umkm sangat kecil dibandingkan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijakan umkm oleh pemerintah selama reformasi hanya sedikit yang dilaksanakan, lebih banyak hanya semboyan saja sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hampir di semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian, dan industri.

Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram dalam pemberdayaan umkm masih lemah kinerja yang diberikan oleh pegawai dalam melayani masyarakat. Lemahnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram dalam umkm disebabkan lemahnya kepemimpinan yang berlangsung di antara unsur-unsur pimpinan dengan unsur-unsur staf dan lemahnya motivasi kerja para pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan uraian tersebut

makapenulis mengangkat judul “Peran Dinas Koperasi dan IKM Kota Mataram Dalam Pengembangan UKM di Kota Mataram”.

1.5. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahannya adalah : “Bagaimanakah strategi pengembangan sektor UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram?”

1.6. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimanakah strategi pengembangan sektor UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram.

1.3.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1.3.4.1.1 Manfaat Teoritik

- 1) Memberikan tambahan pustaka bagi siapa saja yang ingin mengetahui, mempelajari, dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini.
- 2) Dapat menambah pengetahuan bagi kita semua mengenai pengembangan sektor UMKM Kota Mataram.

1.3.4.1.2 Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan masukan dan bantuan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan sektor UMKM Kota Mataram.
- 2) Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan berkaitan dengan proses pengembangan sektor UMKM di Kota Mataram.

1.3.4.1.3 Manfaat Akademik

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.6. Manajemen

Istilah “manajemen” saat ini sudah banyak dikenal di Indonesia, baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan swasta. Hal ini disebabkan karena setiap kegiatan dalam lapangan apapun, cara-cara dalam pencapaian tujuan pada prinsipnya adalah sama, dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen.

Stoner (dalam T. Hani Handoko, 1997:8) menyatakan: “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”

Manullang (dalam Ratminto, Atik Septi Winarsih, 2005:1) menyatakan: “Manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.”

Sedangkan Gibson, Donnelly, dan Ivancevich (dalam Ratminto, Atik Septi Winarsih, 2005:2) menyatakan: “Manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.”

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa Manajemen merupakan suatu proses pencapaian tujuan organisasi yang terdiri dari perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa mempedulikan kecakapan atau ketrampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan- kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan.

Manajemen merupakan proses pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu, tetapi dalam hal ini belum ada persamaan pendapat dari para ahli manajemen tentang apa saja fungsi-fungsi tersebut. G. R. Terry (dalam Alex Nitisemito, 1984:24) mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut :

- a. Perencanaan (*planning*)
- b. Pengorganisasian (*organizing*)
- c. Pendireksian (*directing*)
- d. Pengawasan (*controlling*)

Meskipun sebenarnya masih ada banyak fungsi-fungsi manajemen yang ada, tetapi banyak para tokoh yang berpendapat bahwa keempat fungsi itu yang paling penting dalam proses manajemen.

Salah satu syarat mutlak untuk dapat melaksanakan manajemen yang baik terletak pada pelaksanaan proses perencanaan.

”Perencanaan (*planning*) adalah 1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, dan 2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan” (Handoko, 1997:23).

Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa perencanaan merupakan proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya.

Sebelum manajer dapat mengorganisasi, mengarahkan, atau mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi.

Kebutuhan akan perencanaan ada di semua tingkatan dan pada kenyataannya meningkat di mana tingkatan tersebut mempunyai dampak potensial terbesar terhadap sukses organisasi atau tingkatan manajemen atas. Manajer puncak biasanya mencurahkan sebagian besar waktu perencanaan mereka untuk rencana-rencana jangka panjang dan strategi-strategi organisasi. Manajer pada tingkatan bawah merencanakan terutama bagi kelompok kerjanya dan untuk jangka pendek.

Dalam membuat suatu perencanaan maka diperlukan tahap-tahap atau langkah-langkah tertentu. Tahap-tahap tersebut merupakan prosedur yang harus dilalui dalam setiap pembuatan perencanaan, sebab tanpa melalui tahap-tahap tersebut perencanaan yang dibuatnya akan kurang sempurna. T. Hani Handoko (1997:79) mengemukakan tahap-tahap dalam kegiatan perencanaan pada dasarnya terdiri dari :

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya-sumber dayanya secara tak efektif.

2. Merumuskan keadaan saat ini.

Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk

menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi.

3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.

4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik diantara berbagai alternatif yang ada.

T. Hani Handoko (1997:85) juga mengemukakan terdapat dua tipe utama rencana, yaitu :

- a. Rencana-rencana strategik (*strategic plans*), yang dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas, serta mengimplementasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaan organisasi; dan
- b. Rencana-rencana operasional (*operational plans*), yakni penguraian yang lebih terperinci bagaimana rencana-rencana strategik akan dicapai.

2.7. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses analisis, perumusan, dan evaluasi strategi-strategi yang diterapkan oleh seorang manajer guna mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar organisasi mampu melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Jadi, perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada.

Olsen dan Eadie (dalam Bryson, 2007:5) menyatakan: “Perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu.”

Maksud dari definisi tersebut adalah seorang pimpinan puncak perlu menetapkan langkah-langkah atau strategi apa yang akan diambil untuk melakukan tindakan penting dalam organisasi dengan mengadakan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternalnya terlebih dahulu.

Dalam proses penyusunan strategi tidak hanya memberikan sebuah pemahaman yang realistis tentang jalannya suatu proses serta menerangkan mengapa dan bagaimana sebuah strategi direalisasikan, tetapi juga menyediakan strategi-strategi dengan memperkirakan alternatif pilihan yang nantinya akan memberikan hasil yang berbeda dan lebih baik.

Menurut Bryson (2007:12-13), perencanaan strategis memiliki beberapa manfaat, yaitu :

- a. Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif.
- b. Memperjelas arah masa depan.
- c. Menciptakan prioritas
- d. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan.
- e. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan.
- f. Menggunakan kekuasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada di bawah kontrol organisasi.
- g. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.
- h. Memecahkan masalah utama organisasi.
- i. Memperbaiki kinerja organisasi.
- j. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif.
- k. Membangun kerja kelompok dan keahlian.

Lebih lanjut, Bryson (2007:55) menjelaskan bahwa pada perencanaan strategis terdapat delapan langkah yang dapat membantu organisasi dalam berpikir dan bertindak secara strategis. Langkah-langkah tersebut adalah :

1. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis.
2. Mengidentifikasi mandate organisasi.
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.
4. Menilai lingkungan eksternal : peluang dan ancaman.
5. Menilai lingkungan internal : kekuatan dan kelemahan.
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi.

7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu.
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

Langkah pertama, memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis. Tujuan dari proses awal perencanaan strategis adalah untuk menegosiasikan kesepakatan dengan pembuat keputusan kunci, baik di tingkat internal maupun eksternal. Dorongan dan komitmen awal ini sangat penting bagi suatu perencanaan strategi yang sukses. Langkah kedua, mengidentifikasi mandat organisasi. Mandat merupakan sesuatu yang perlu dilakukan, yang lebih terfokus pada fungsi/ tugas dan kewajiban organisasi, sehingga tujuan langkah kedua ini adalah mengenali dan memperjelas makna dan sifat mandat yang diemban organisasi, baik formal maupun informal.

Langkah ketiga, memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Misi memberikan pemahaman mengenai tujuan organisasi atau mengapa organisasi harus melakukan dan apa yang dilakukan. Langkah keempat, menilai lingkungan eksternal, dimaksudkan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Peluang dan ancaman dapat diidentifikasi dengan memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Langkah kelima, menilai lingkungan internal. Langkah ini dapat dilakukan dengan memonitor kondisi sumber daya yang dimiliki (*input*), strategi mana yang digunakan sekarang (*proses*), dan bagaimana kinerja pegawai (*output*).

Langkah keenam, mengidentifikasi isu strategi yang dihadapi organisasi. Suatu pernyataan mengenai permasalahan strategis harus memuat tiga elemen yaitu metode pengungkapan yang sesingkat mungkin, pentabulasian faktor-faktor

penyebab permasalahan strategis, dan penentuan konsekuensi kegagalan dalam mengatasi permasalahan strategis tersebut. Langkah ketujuh, merumuskan strategi untuk mengelola isu. Merancang strategi dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan strategis yang dihadapi. Sebuah strategi yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria berikut : secara teknis dapat dilaksanakan, secara politis dapat diterima, dan strategi tersebut harus terkait dengan permasalahan yang akan diatasi. Langkah kedelapan, menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan. Langkah terakhir dalam proses perencanaan strategis ini, organisasi mengemban deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu, sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.

Selanjutnya dengan mengadopsi konsep perencanaan strategis yang telah dikemukakan oleh Bryson, penulis meringkas langkah-langkah dalam perencanaan strategis yang meliputi :

1. Identifikasi Visi, Misi, dan Mandat Dinas Koperasi dan UKM

Identifikasi visi, misi, dan mandat diperlukan untuk mengetahui alasan kehadiran suatu organisasi dan tujuan apa yang ingin diwujudkan dengan membentuk organisasi tersebut. Tujuan identifikasi mandat adalah untuk mengenali dan memperjelas tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram. Visi organisasi adalah gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang dan menjadi arah atau pegangan bagi Dinas Koperasi dan UKM dalam mewujudkan cita-cita yang selaras dan berkesinambungan, sedangkan misi organisasi adalah tujuan yang unik yang dapat membedakannya dengan organisasi lain yang sejenis dengan

mengidentifikasi cakupan operasinya. Jika mandat merupakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, maka misi adalah mengapa organisasi melakukan apa yang dilakukan.

2. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

a. Faktor Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan situasi dan kondisi dalam organisasi yang saling mempengaruhi serta terkait dengan misi, mandat, tugas, dan fungsi organisasi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan analisis terhadap lingkungan internal Dinas Koperasi dan UKM bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Dinas Koperasi dan UKM, yang merupakan aspek-aspek yang membantu maupun yang merintangai pencapaian misi dan pemenuhan mandat.

b. Faktor Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan di luar organisasi yang tidak dikendalikan oleh organisasi, namun mempengaruhi organisasi. Lingkungan eksternal Dinas Koperasi dan UKM sangat luas dan kompleks serta selalu berubah-ubah. Perubahan tersebut berlangsung cepat, baik direncanakan, baik direncanakan maupun tidak direncanakan dan perubahan pasti terjadi. Agar Dinas Koperasi dan UKM tidak mengalami kemunduran, maka Dinas Koperasi dan UKM harus mampu melakukan adaptasi dan merespon perubahan lingkungan eksternal yang terjadi. Lingkungan eksternal organisasi berpotensi menimbulkan peluang dan ancaman bagi Dinas Koperasi dan UKM. Analisis lingkungan eksternal dalam penelitian

ini dilakukan melalui :

Hasil identifikasi terhadap lingkungan ini memberikan gambaran kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*treath*) atau sering disebut sebagai metode analisis SWOT yang diadopsi dari konsep manajemen strategis.

Pearce dan Robinson (dalam Fredi Rangkuty, 1997:31) memberikan penjelasan tentang SWOT sebagai berikut :

- a. Kekuatan (*strength*) adalah sumber daya, ketrampilan, atau keunggulan lain yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan.
- b. Kelemahan (*weakness*) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, ketrampilan, dan kapabilitas yang secara serius dapat menghambat kinerja efektif perusahaan.
- c. Peluang (*opportunity*) adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan penting adalah merupakan salah satu sumber peluang identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan peraturan, perubahan teknologi, membaiknya hubungan dengan konsumen dapat memberi peluang.
- d. Ancaman (*threath*) adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan, ancaman merupakan pengganggu utama dalam organisasi, adanya pesaing, perubahan teknologi, adanya peraturan baru atau yang direvisi yang dapat menjadi ancaman bagi keberadaan organisasi.

3. Identifikasi Isu Strategis

Identifikasi isu strategis merupakan tahapan yang paling menentukan pada proses perencanaan strategis. Mengidentifikasi isu-isu strategis merupakan tahapan yang paling menentukan dalam proses perencanaan strategis, yang dilakukan dengan berdasarkan dari analisis SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi suatu organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Matrik Analisa SWOT

	INTERNAL <i>(Strength/S)</i>	Kelemahan <i>(Weakness/W)</i>
EKSTERNAL	Tentukan 5-10 faktor kekuatan internal	Tentukan 5-10 faktor kelemahan eksternal
Kesempatan <i>(Opportunity/O)</i> Tentukan 5-10 faktor yang menjadi peluang eksternal	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman <i>(Treath/T)</i> Tentukan 5-10 faktor yang menjadi ancaman eksternal	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Matrik Analisa SWOT (Fredri Rangcuty, 1997:31)

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi ST

Strategi yang dibuat dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

4. Merumuskan strategi untuk mengelola isu

Bryson (2007:189) menyatakan: "Strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi melakukannya?"

Jadi, merumuskan strategi adalah merumuskan program-program strategis atau alternatif kebijakan mendasar yang akan dilakukan organisasi untuk mengelola isu. Pada tahap ini dirumuskan program-program strategis, alternatif-alternatif kebijakan mendasar yang akan dilakukan organisasi untuk menanggapi isu strategis yang berada pada tahap sebelumnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang melibatkan usaha-usaha untuk memadukan

organisasi dengan perubahan lingkungan dengan cara yang paling menguntungkan organisasi. Dimana perencanaan strategis meliputi adaptasi organisasi dengan memperhatikan lingkungan internalnya yaitu kekuatan (*strengths*) – kelemahan (*weakness*) yang dimiliki organisasi terhadap lingkungan eksternal organisasi berupa peluang (*opportunities*) – ancaman (*threats*). Dengan kata lain, bahwa analisis lingkungan tersebut merupakan landasan utama bagi identifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan serta berbagai peluang beserta tantangan yang pada tahap selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh isu-isu strategis yang dihadapi organisasi

2.8. Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategos*", yang berarti *a general set of maneuver carried out to overcome an enemy during combat*, yaitu sekumpulan senjata yang digunakan untuk memerangi musuh selama peperangan. Jadi, memang istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara populer sering dinyatakan sebagai "kiat yang digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan suatu peperangan". Namun dewasa ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi, dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan, hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya.

Secara umum strategi diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh manajer atau pimpinan puncak untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemen-elemen di dalamnya untuk

menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Di dalam perkembangannya definisi strategi mengalami perluasan arti. Berikut ini beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa ahli manajemen. Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner (dalam Freddy Rangkuty, 1997:4) memberikan definisi strategi sebagai berikut : "Strategi merupakan respon –secara terus menerus maupun adaptif- terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi."

Sedangkan J. Salusu (1996:101) menjelaskan pengertian strategi sebagai berikut : "Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan."

Ahli lainnya yaitu Bryson (2007:189) dalam bukunya "Perencanaan Strategik Untuk Organisasi Sosial" memberikan definisi strategi sebagai berikut : "Strategi adalah pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi harus mengerjakannya."

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, dan alokasi sumber daya organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Strategi telah diartikan sebagai aktivitas yang telah terlaksana secara sosial dan sesuai dengan situasi yang ada. Sedangkan

penyusunan strategi mencakup aksi-aksi, interaksi-interaksi, dan negosiasi dari banyak pihak, serta menyangkut praktek-praktek tertentu yang mereka pakai dalam melakukan kegiatan tersebut.

Selanjutnya Koten (dalam J. Salusu, 1996:105) menjelaskan tentang tipe-tipe strategi yang diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu :

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategik yang baru.
2. *Program Strategy* (Strategi program). Strategi ini lebih memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategik dari suatu program baru.
3. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya). Strategi ini memusatkan pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
4. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan). Fokus dari strategi ini adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik.

Strategi yang disusun para eksekutif hendaknya menjamin dapat berhasil dengan meyakinkan, tidak hanya dipercaya orang lain tetapi juga harus dapat dilaksanakan.

Hatten dan Hatten (dalam J. Salusu, 1996:108) memberikan beberapa petunjuk bagaimana suatu strategi dibuat sehingga ia dapat sukses, yaitu :

1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungan, jangan melawan arus yang berkembang dalam masyarakat sehingga ada peluang.
2. Setiap organisasi tidak hanya memuat satu strategi.

3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraikan satu dengan yang lain.
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya.
5. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis, sehingga strategi adalah merupakan sesuatu yang layak dan dapat dilaksanakan.
6. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar.
7. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
8. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditempatkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari para eksekutif dari semua pimpinan unit kerja dalam kerja organisasi.

Selanjutnya berkembang “manajemen strategik” yang merupakan motor penggerak dari strategi yang telah dibuat. Banyak ahli mengartikan manajemen strategik, antara lain Hadari Nawawi (2002:150), beberapa karakteristik menurutnya sebagai berikut :

1. Wujud manajemen strategik berupa perencanaan yang dituangkan dalam rencana strategik dan rencana operasional dan program kerja.
2. Rencana Strategik berorientasi pada jangkauan masa depan (jangka panjang), rencana operasional ditetapkan untuk rencana jangka menengah dan program-program kerja untuk rencana jangka pendek.
3. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis organisasi merupakan acuan untuk merumuskan rencana strategis.

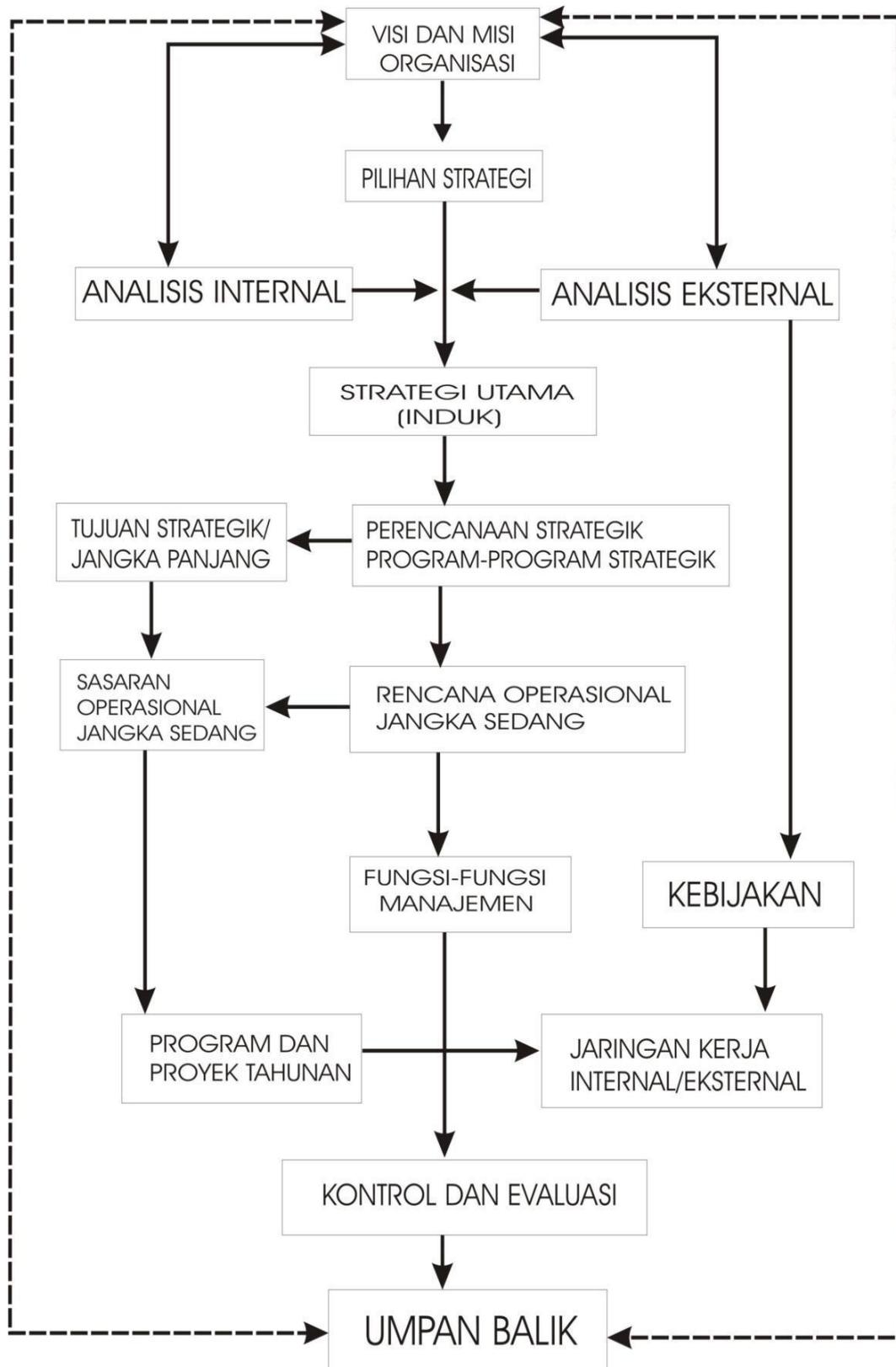
4. Rencana strategis dijabarkan menjadi rencana operasional yang berisi program-program operasional dengan sasaran jangka pendek.
5. Penetapan rencana strategis dan rencana operasional harus melibatkan manajemen puncak.
6. Pelaksanaan strategi yang tertuang dalam program kerja harus dilakukan melalui fungsi- fungsi manajemen yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan (*actuating*), penganggaran, dan kontrol.

Dengan demikian, pelaksanaan strategi yang tertuang dalam program kerja harus dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen mencakup pengorganisasian, pelaksanaan (*actuating*), penganggaran, dan kontrol.

Manajemen Strategik sebagai suatu sistem ditunjukkan dalam diagram sebagai berikut :



Gambar 2
Diagram Manajemen Strategik sebagai Sistem



Dari gambar tersebut di atas, dapat dilihat bahwa perencanaan strategis

merupakan salah satu komponen dari manajemen strategis disamping komponen perencanaan operasional. Langkah-langkah perencanaan strategis menurut gambar 2 yaitu :

1. Menetapkan visi dan misi organisasi.
2. Analisis internal.
3. Analisis eksternal.
4. Pilihan strategis.
5. Strategi utama (induk).
6. Program-program strategis.
7. Tujuan strategis.

Berdasarkan teori-teori di atas mengenai langkah-langkah perencanaan strategis dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan strategis terdiri dari lima langkah pokok sebagai berikut :

1. Identifikasi misi dan mandat organisasi.
2. Analisis lingkungan internal dan eksternal (analisis swot).
3. Identifikasi isu-isu strategis.
4. Evaluasi isu strategis.
5. Merumuskan strategi untuk mengelola isu.

2.9. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU ini digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No.	Usaha	Kriteria	
		Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

2.10. Pengembangan UMKM

Kata "pengembangan" yang dikemukakan oleh J. S. Badudu (dalam KBBI, 1989:414) sebagaimana tercantum dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai hal, cara, atau hasil mengembangkan; sedangkan mengembangkan sendiri berarti membuka, memajukan, menjadi maju, dan bertambah baik.

Definisi lain mengenai pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

"Pengembangan merupakan proses, cara, perbuatan mengembangkan, sedangkan mengembangkan merupakan perintah selalu berusaha di pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus pada sasaran yang dikehendaki."

Menurut Gede Diva (2009:15-18), dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator :

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM.

Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung. Dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa, pertama, pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa. Kedua, keistimewaan, baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Ketiga, kebijakan yang tersendiri. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat terjadi tergantung pada bagaimana pemerintah memandang keberadaan UMKM yang akan diberi fasilitas, pertama, pemerintah antipati atau tidak senang terhadap keberadaan UMKM. Kedua, pemerintah apatis atau tidak mau tahu terhadap perkembangan UMKM. Ketiga, pemerintah netral yang berarti pemerintah memperlakukan UMKM sama dengan badan usahanya, tidak ada aturan khusus bagi UMKM. UMKM harus bersaing dengan badan usaha lain. Keempat, pemerintah simpati dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM atau dorongan motivasi perlindungan terhadap UMKM pada pembuatan aturan.

2. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku

Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.

3. Peran pemerintah sebagai katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, seperti halnya sebuah katalis, pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. Keterlibatan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak lagi secara alami. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif

bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir.

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pengembangan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan segala aspek dalam tubuh organisasi agar mengarah pada pencapaian tujuan.

Hasil yang diharapkan dari pengembangan adalah agar pegawai memiliki pengetahuan atau informasi baru, kemudian mampu menerapkan pengetahuan baru tersebut guna meningkatkan kinerja dan kecakapan serta mengubah perilaku menjadi lebih baik sebagai salah satu usaha dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Sementara dalam kaitannya dengan pengembangan sektor UMKM ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang :

1. Produksi dan pengolahan
2. Pemasaran

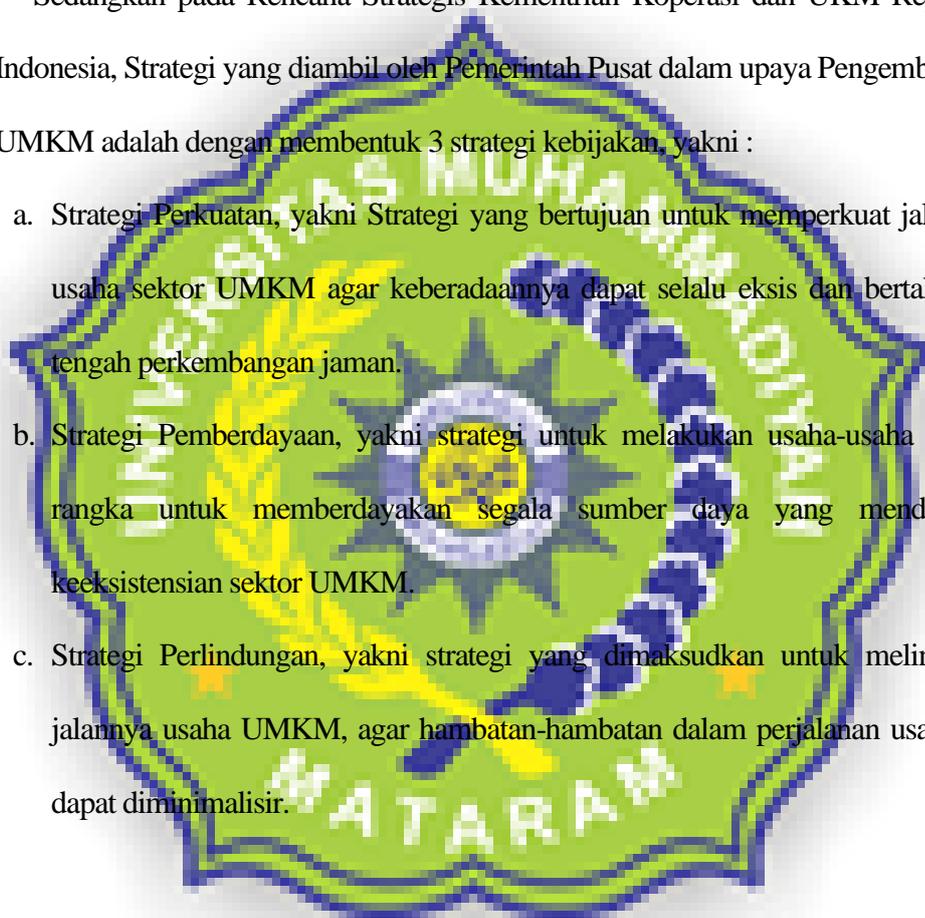
3. Sumber Daya Manusia

4. Desain dan Teknologi

Pengembangan usaha tersebut juga melibatkan Dunia Usaha serta Masyarakat dalam berperan serta secara aktif untuk melakukan proses pengembangan tersebut di atas.

Sedangkan pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Strategi yang diambil oleh Pemerintah Pusat dalam upaya Pengembangan UMKM adalah dengan membentuk 3 strategi kebijakan, yakni :

- a. Strategi Perkuatan, yakni Strategi yang bertujuan untuk memperkuat jalannya usaha sektor UMKM agar keberadaannya dapat selalu eksis dan bertahan di tengah perkembangan jaman.
- b. Strategi Pemberdayaan, yakni strategi untuk melakukan usaha-usaha dalam rangka untuk memberdayakan segala sumber daya yang mendukung keeksistensian sektor UMKM.
- c. Strategi Perlindungan, yakni strategi yang dimaksudkan untuk melindungi jalannya usaha UMKM, agar hambatan-hambatan dalam perjalanan usahanya dapat diminimalisir.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.5. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang terjadi secara sistematis, aktual, dan akurat sesuai dengan fakta yang ada dengan mengumpulkan data, menjelaskan dan melakukan analisa secara obyektif dalam arti hasil penelitian ini akan lebih menekankan pada gambaran mengenai obyek penelitian yang sebenarnya.

Tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk menyusun gambaran mengenai obyek yang diteliti dengan terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data-data di lokasi penelitian, lalu data tersebut diolah dan diartikan untuk kemudian dapat melakukan analisa dan interpretasi dari data yang telah disajikan.

3.6. Subyek dan Obyek Penelitian

Agar di dalam penyusunan skripsi ini dapat mencapai sasaran yang diharapkan, diperlukan adanya data-data dari berbagai sumber yang dapat membantu dalam penyusunan yang nantinya akan disusun dan diolah untuk memperkuat analisis. Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2002:112), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sedangkan selebihnya adalah merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sedangkan sumber data yang tercakup dalam penelitian ini meliputi :

A. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram. Adapun informan-informan tersebut adalah :

- 1) Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM, Ir. H. Zainul Wardi.
- 2) Seksi Pengembangan UKM, Drs. H. Asaad Zaglul.
- 3) Seksi Pemberdayaan UMKM, Retno Kusumaningtyas, S.Psi.
- 4) Seksi Fasilitasi Pengembangan KUKM, Nurhayati, SH.
- 5) Seksi Peningkatan Kapasitas SDM, Baiq Mardiana Hayati, SH.
- 6) Pelaku UMKM Kota Mataram, antara lain :
 - a) Atas nama Zuhaer, Perusahaan Zuma Farfum, Alamat Jln. Pendidikan No. 1A Gomong Baru.
 - b) Atas nama Syukur Asri, Perusahaan Pemuda Mandiri, Alamat Jalan Pemuda Gomong Mataram.

B. Dokumen

Dokumen dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Beberapa dokumen yang dijadikan sebagai pelengkap data dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI

- 2) Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta Tahun 2013-2018
- 3) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- 4) LKJIP Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018
- 5) Mataram Dalam Angka 2018 (BPS)

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang harus digunakan dalam mengadakan suatu penelitian, agar mendapat data sesuai dengan apa yang diinginkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

A. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab kepada orang yang diselidiki atau responden untuk mendapat data yang akurat. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, yaitu hal-hal yang tidak dapat diketahui melalui observasi. Disamping itu juga untuk memastikan dan mengecek informasi yang diperoleh.

B. Teknik Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilaksanakan secara langsung untuk dapat mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya dari obyek penulisan serta pengumpulan data sebanyak-banyaknya. Dalam penulisan ini digunakan teknik observasi berperan pasif dimana penulis tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh obyek penulisan.

Penulis hanya mengamati kegiatan yang sedang berlangsung dari obyek penulisan.

C. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Hubberman, yang disebut dengan *interactive model of analysis*. Menurut H.B. Sutopo (2002:96), model ini terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu : data reduction, data display, dan conclusion drawing. Untuk lebih jelasnya, maka perlu diuraikan ketiga komponen kegiatan tersebut, yaitu:

A. *Data Reduction*

Mereduksi data adalah proses mempertegas, memperpendek, menyeleksi, membuat fokus, membuang yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan.

B. *Data Display*

Merupakan kegiatan pengorganisasian data, agar tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan makin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data,

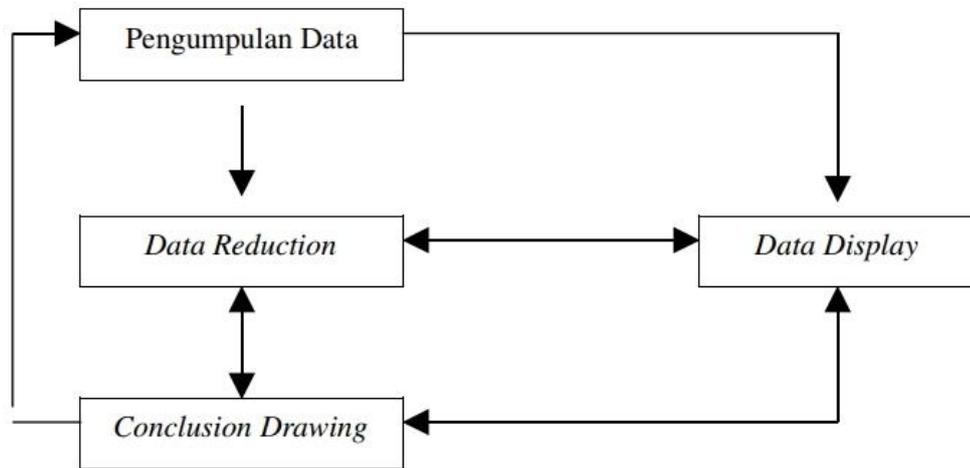
maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

C. *Conclusion Drawing*

Dalam awal pencarian data, peneliti harus sudah mengerti apa arti hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan proposisi-proposisi. Berbagai hal tersebut dipegang oleh peneliti tidak secara kuat, artinya tetap bersikap terbuka, yang awalnya kurang jelas, kemudian semakin meningkat secara eksplisit hingga memiliki landasan yang kuat.

Ketiga komponen analisis tersebut dapat juga dilakukan dengan cara bahwa ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan berbagai proses siklus. Dalam bentuk ini penulis tetap bergerak diantara ketiga komponen dengan komponen pengumpulan data selama proses pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data kemudian bergerak diantara data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya. Proses analisis tersebut sering juga disebut model analisis interaktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3
Model Analisis Interaktif



Sumber : H.B. Sutopo (2002:96)

